

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian internal dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dapat diartikan sebagai desentralisasi, dimana penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan proses pemberdayaan dan kemampuan suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menyusun dan mengatasi masalah ekonomi masing-masing daerah yang ditujukan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat sendiri dalam pembangunan daerah (Nurdin, 2010: 2).

Anggaran pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran. Kelemahan utama dalam

manajemen keuangan daerah adalah tidak adanya ukuran kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, ratifikasi, implementasi dan evaluasi terhadap keuangan daerah. Selama ini satu-satunya ukuran kinerja yang ada adalah ukuran kinerja yang ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu aturan bahwa belanja daerah yang tertera dalam APBD adalah jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos belanja daerah. Dengan aturan ini, kinerja belanja daerah disebut baik apabila realisasinya sesuai dengan target yaitu semua dana belanja daerah dihabiskan pada tahun yang bersangkutan.

Untuk melihat kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Penilaian kinerja oleh lembaga pemerintah dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangannya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal lain yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Berdasarkan laporan realisasi APBD yang mencerminkan pencapaian atas tujuan pemerintah daerah dalam

menjalankan program serta kegiatannya maka kinerja atas anggaran tersebut dapat dilihat (Sasongko, 2009: 6).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan. Anggaran menurut GASB (*Governmental Accounting Standards Board*) berarti rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu (Nurdin, 2010: 2).

Pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk APBD adalah salah satu aspek pelaksanaan otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga bisa berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan sedangkan efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Berdasarkan hal tersebut, APBD dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu daerah itu baik atau tidak maka perlu dilakukan suatu analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Analisis kinerja keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan

melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Kabupaten Gorontalo Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 (lembaran Negara Republik Indonesia) merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah semaksimal mungkin telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi meskipun belum seluruhnya memenuhi aspek-aspek tersebut. Berikut beberapa fenomena-fenomena yang terjadi:

1. Keterbatasan sumber pendanaan dalam pembangunan daerah baik dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana transfer dan bagi hasil pajak yang berimbas pada kurangnya pendapatan.
2. Penyerapan dana yang belum maksimal karena adanya keterlambatan anggaran yakni pada bulan juni-juli dan masih adanya keterkaitan dengan pihak pusat.
3. Belanja daerah yang terlalu rendah sehingga mengakibatkan adanya beberapa program kerja yang tidak dilaksanakan dengan baik.
4. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi namun belum terkelola dengan optimal.
5. Tidak tercapainya target anggaran yang dianggarkan pada tahun 2010

Berdasarkan beberapa fenomena di atas peneliti termotivasi untuk meneliti kinerja keuangan Pemerintah Kab.Gorontalo Utara. Dengan Judul Analisis

Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.
Gorontalo Utara

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya campur tangan dari pihak pusat.
2. Keterbatasan sumber pendanaan dalam pembangunan daerah baik dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana transfer dan bagi hasil pajak yang berimbas pada kurangnya pendapatan.
3. Adanya beberapa program kerja yang tidak dilaksanakan dengan baik karena belanja daerah yang rendah.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD , efisiensi keuangan daerah, keserasian belanja daerah dan pertumbuhan Kab.Gorontalo Utara selama 2008-2010?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan APBD Kab.Gorontalo Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD , efisiensi keuangan daerah, keserasian belanja daerah dan pertumbuhan Kab.Gorontalo Utara selama 2008-2010?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan APBD Kab.Gorontalo utara selama tahun 2008 – 2010.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang akuntansi pemerintahan, khususnya dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi sumbangsih pemikiran yang bersifat ilmiah dan dapat memberikan kontribusi yang baik berupa informasi serta menjadi bahan masukan bagi pihak entitas sehubungan dengan kinerja keuangan Kab. Gorontalo Utara